

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini memiliki berbagai macam jenis kegiatan perekonomian yang ditekuni. Peran perekonomian mikro di Indonesia berkembang pesat setelah berakhirnya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Kemajuan tersebut tidak lepas dari peran para penggelut bisnis. Dalam pengembangan bisnis dan perekonomian, para pelaku usaha mikro tersebut tidak lepas dari bantuan lembaga keuangan.

Di Indonesia terdapat dua kategori yang di ambil dari Bank Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Bank dan Non Bank. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Bank meliputi BPR, BRI Unit Desa, dan Badan Kredit Desa. Kemudian untuk Lembaga Keuangan Mikro Non Bank meliputi Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Baitul Maal Tamwil, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Koperasi Simpan Pinjam, dll.

Dalam aktivitas perekonomian telah berdiri banyak bank konvensional di kalangan masyarakat. Lembaga keuangan syariah pun kini telah merebak di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia, pengembangan perbankan syariah memiliki masa depan yang baik. Karena masyarakat yang mayoritas beragama Islam meyakini bahwa akan datang keberkahan rizki dari Allah SWT dengan lembaga keuangan berbasis islam

Dalam usaha meyakinkan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah dan dengan proses yang cukup panjang, pada tanggal 16 Juli 2008 telah disahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Usaha mengembangkan kesejahteraan perekonomian juga dilaksanakan oleh BMT dengan cara memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat. Tetapi tidak selalu pembiayaan dalam BMT tidak mengalami hambatan yang dapat mengganggu kelangsungan BMT itu sendiri. Dalam prosesnya terjadi pula pembiayaan yang mengalami masalah, diantaranya pembiayaan yang macet. Kejadian tersebut tidak lepas dari faktor internal dan eksternal pada BMT. Faktor internal yang merupakan lingkup dari dalam BMT dan faktor eksternal yang merupakan lingkup dari luar, yaitu anggota BMT. Untuk itu BMT harus mempunyai sistem pengendalian internal yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk mengurangi resiko tersebut. Sistem Pengendalian Internal meliputi segala bentuk koordinasi, dan keandalan data akuntansi yang dilakukan untuk menjaga kekayaan organisasi

Peneliti melakukan penelitian pada BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang dalam sistem pengendalian internal dalam pengambilan keputusan atas pencairan pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Tugas Akhir berjudul “Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengambilan Keputusan Atas Pencairan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang”. Sistem Pengendalian Internal di dalam organisasi BMT sangatlah penting karena mempengaruhi operasional yang berjalan di dalamnya. Dengan itu peneliti ingin

membuktikan apakah di dalam BMT- Al Hikmah memiliki sistem pengendalian internal yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah Bagaimana sistem pengendalian internal pada BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses pencairan pembiayaan Mudharabah

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan penerapan sistem pengendalian internal pada BMT Al Hikmah untuk pengambilan keputusan dalam proses pencairan pembiayaan Mudharabah

Manfaat penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat mempelajari dan memperoleh pengetahuan mengenai sistem Pengendalian Internal pada BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang
2. Bagi pembaca, dapat mengetahui lebih dalam mengenai Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang
3. Bagi BMT Al Hikmah, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai sistem pengendalian internal yang telah diterapkan.